

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia berjuang dengan penuh pengorbanan hingga akhirnya berhasil meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, pencapaian kemerdekaan tersebut tidak serta-merta membawa bangsa Indonesia keluar dari tantangan perjuangan yang ada. Sebagai sebuah *national-state* yang baru saja melepaskan diri dari kolonialisme, Indonesia menghadapi situasi yang sangat tidak stabil. Ketidakstabilan ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga meliputi aspek psikis, di mana rakyat dan pemimpin bangsa harus berjuang keras untuk membangun identitas nasional serta meneguhkan posisi sebagai negara yang mandiri¹. Upaya ini penting agar Indonesia bisa lepas dari pengaruh asing dan menegakkan kedaulatannya di dunia internasional.

Dalam negara yang masih menghadapi masalah seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan tradisi otoriter, keberhasilan sangat bergantung pada kebijaksanaan dan keberuntungan pemimpinnya. Kepemimpinan menjadi kunci dalam menentukan arah dan masa depan bangsa, terutama saat masa transisi menuju stabilitas dan pembangunan. Namun demikian, sebagian besar sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 memperlihatkan kisah kegagalan sejumlah pemimpin dalam memenuhi harapan-harapan tinggi yang tumbuh seiring keberhasilan mencapai kemerdekaan².

¹ R. Z. Leirissa, *PRRI/Permesta Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991. hlm. 7

² M. C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2008. hlm. 493

Harapan tersebut tidak hanya datang dari rakyat yang mendambakan perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, tetapi juga dari komunitas internasional yang melihat Indonesia sebagai negara baru dengan potensi besar. Sayangnya, alih-alih membawa bangsa menuju kemajuan yang berkelanjutan, banyak kepemimpinan di masa itu justru terjebak dalam konflik internal, kebijakan yang tidak efektif, dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, janji-janji kemerdekaan seperti keadilan sosial, pemerataan pendidikan, dan peningkatan taraf hidup rakyat sering kali tidak terwujud, meninggalkan jejak kekecewaan yang mendalam di tengah masyarakat.

Konflik-konflik yang terjadi pada pertengahan hingga akhir 1950-an, seperti PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi, mengungkapkan sisi lain dari permasalahan internal Indonesia, yaitu hubungan yang timpang antara pemerintah pusat dan daerah. Munculnya PRRI merupakan hasil dari akumulasi kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Ketidakpuasan ini muncul akibat ketimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan, sementara daerah-daerah di luar Pulau Jawa merasa terabaikan³.

³ Dhoni Frizky Aryasahab, Sejarah PRRI / Permesta : Awal Mula Munculnya Otonomi Daerah Secara Menyeluruh Di Indonesia, *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8.1 (2023), 37–44. hlm. 40

Wilayah Sumatra, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, karet, dan hasil tambang, merasa bahwa kontribusi ekonominya tidak dihargai secara adil oleh pemerintah pusat di Jakarta. Hasil kekayaan alam tersebut dinilai lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di Jawa, sementara kebutuhan pembangunan di Sumatra sendiri diabaikan. Ketimpangan ini menciptakan rasa frustrasi dan perasaan dianaktirikan yang memicu munculnya PRRI sebagai bentuk perlawanan terhadap pusat.

Situasi serupa juga terjadi di Sulawesi, yang menyaksikan tumbuhnya gerakan Permesta. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran, distribusi kekuasaan, dan perhatian pemerintah pusat yang dianggap tidak memadai untuk wilayah-wilayah di luar Jawa. Baik PRRI maupun Permesta tidak hanya menunjukkan ketegangan akibat ketimpangan pembangunan, tetapi juga menggambarkan persoalan struktural dalam tata kelola negara yang belum sepenuhnya mampu menyatukan keberagaman wilayah dan kepentingan dalam bingkai kesatuan nasional.

Dalam menghadapi ancaman perpecahan yang ditimbulkan oleh konflik PRRI/Permesta, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan mengambil berbagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan dan menjaga keutuhan negara. Djuanda menyadari bahwa pendekatan militer semata tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki akar sosial, politik, dan ekonomi

yang kompleks. Oleh karena itu, ia lebih mengedepankan strategi diplomasi dan persuasi dalam menangani pemberontakan ini.

Djuanda bukanlah pemimpin yang mengedepankan pendekatan keras dalam menghadapi konflik PRRI/Permesta. Sebaliknya, ia berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur diplomasi dan perundingan. Dalam upaya mencari solusi damai, Djuanda bahkan ingin melibatkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar, seperti Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX⁴. Hal tersebut dilakukan guna membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pihak pemberontak.

Namun, meskipun negosiasi menjadi pilihan utama, Djuanda juga menyadari bahwa tindakan tegas tetap diperlukan demi menyelamatkan persatuan bangsa dan keutuhan negara⁵. Ketika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah militer untuk meredam pemberontakan dan mengembalikan stabilitas nasional. Keputusan ini bukan didasarkan pada ambisi kekuasaan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara agar Indonesia tidak terpecah akibat konflik internal.

Tekad kuat yang dipegang oleh Djuanda dan kabinetnya mencerminkan keseimbangan antara diplomasi dan tindakan nyata. Ia tidak ingin menggunakan kekuatan militer sebagai pilihan utama, tetapi dalam situasi yang mendesak,

⁴ Awaloedin Djamin, *Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Negarawan, Administrator, Dan Tektokrat Utama* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001). hlm. 135

⁵ *ibid.* hlm. 136

langkah tersebut harus diambil demi menjaga keutuhan Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi.

Dengan uraian tersebut, maka menjadi penting untuk diketahui mengenai peran Ir. H. Djuanda kartawidjaja dalam meredam konflik PRRI permesta, bagaimana profil Djuanda dan perjalanan politik djuanda sehingga bisa memimpin sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan. untuk itu penulis mencoba menggambarkan riwayat hidup Djuanda Kartawidjaja berikut dengan kontribusinya dalam menyelesaikan konflik PRRI/Permesta dalam skripsi yang berjudul "Peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam Upaya Penyelesaian Konflik PRRI/Permesta pada Tahun 1958-1959".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah yaitu bagaimana peran Ir. Djuanda Kartawidjaja dalam penyelesaian konflik PRRI/Permesta pada tahun 1958–1959? Rumusan masalah ini lalu dijabarkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana profil dan karir politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaja?
2. Bagaimana awal terjadinya konflik PRRI/Permesta?
3. Bagaimana peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam upaya penyelesaian konflik PRRI/Permesta pada tahun 1958-1959?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana

kehidupan serta perjuangan Ir. H. Djuanda sebagai perdana menteri dalam upaya penyelesaian konflik nasional sehingga bisa menjadi pahlawan nasional yang dapat menjadi cerminan sifat cinta tanah air yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Tujuan penulis dapat diuraikan kepada poin-poin berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana profil dan karir politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaja
2. Untuk mengetahui bagaimana awal terjadinya konflik PRRI/Permesta
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam upaya penyelesaian konflik PRRI/Permesta pada tahun 1958-1959.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca dalam mengembangkan wawasan intelektual serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian yang relevan. Selain itu, bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan menjadi sarana refleksi ilmiah yang mendorong pendalaman dan penguatan kompetensi akademik, baik dari segi metodologi maupun pemahaman teoritis.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menambahkan historiografi Indonesia dengan menganalisis peran Ir. Djuanda Kartawidjaja dalam menghadapi krisis nasional, khususnya pemberontakan PRRI/Permesta. Penelitian ini memperkuat pemahaman tentang

bagaimana elite politik pasca-kemerdekaan menjaga integrasi nasional dalam masa transisi menuju stabilitas politik. Penelitian ini juga menawarkan wawasan tentang pendekatan dualistik dalam penyelesaian konflik bersenjata dengan menggunakan kombinasi dari operasi militer dan jalur diplomasi. Serta dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai ketegangan antara sentralisasi kekuasaan dan tuntutan otonomi daerah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya seputar tokoh nasional Ir. Djuanda, sejarah politik, resolusi konflik, dan dinamika pusat-daerah

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini menyediakan pemahaman aplikatif yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat sipil. Prinsip-prinsip negosiasi dan pendekatan integratif yang digunakan Ir. Djuanda relevan sebagai model dalam menyelesaikan konflik sosial-politik kontemporer di Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sejarah dan ilmu politik, sehingga generasi muda dapat memahami dinamika nasional dan kontribusi tokoh bangsa secara lebih mendalam. Narasi tentang perjuangan Ir. Djuanda dalam mempertahankan keutuhan NKRI dapat memperkuat nasionalisme di tengah tantangan fragmentasi identitas dan separatis.

1.4.3 Kegunaan Empiris

Penelitian ini menyajikan dokumentasi faktual mengenai strategi politik dan militer dalam meredam pemberontakan yang terverifikasi melalui arsip dan literatur sejarah. Temuan dari penelitian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan

mengenai isu-isu kepemimpinan, relasi kekuasaan, dan pertahanan nasional di masa awal Republik Indonesia.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Kajian Teoritis

1.5.1.1 Teori Peran

Ralph Linton mengemukakan bahwa setiap individu dalam masyarakat menempati posisi sosial tertentu yang disebut status, dan setiap status tersebut disertai dengan seperangkat perilaku yang diharapkan, yang disebut peran (*role*). Linton membedakan status menjadi dua jenis yaitu status *ascribed* yaitu status yang diperoleh sejak lahir tanpa usaha pribadi, seperti status etnis, gender, atau keturunan dan status *achieved* yaitu status yang dicapai melalui proses pendidikan, kerja keras, dan pencapaian pribadi misalnya, menjadi pemimpin politik atau pejabat negara⁶. Peran merupakan ekspresi konkret dari status yang diemban. Ia mencakup ekspektasi sosial terhadap tindakan, tanggung jawab, dan sikap seorang individu berdasarkan posisi sosialnya. Dalam struktur pemerintahan, status sebagai pejabat negara membawa peran formal (sesuai jabatan resmi) maupun peran informal (pengaruh moral, budaya, dan sosial).

Dalam konteks sejarah Indonesia, Ir. Djuanda menempati status *achieved* sebagai perdana menteri yang ditunjuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Status ini menuntutnya untuk memainkan peran strategis dalam menjaga integritas nasional di tengah tantangan pemberontakan daerah melalui PRRI dan Permesta.

⁶ Ralph Linton, *The Study of Man*, Appleton Century Crofts, Inc., 1936. hlm. 113-115

Peran formal Ir. Djuanda sebagai kepala pemerintahan mengharuskannya untuk menyusun kebijakan politik dan keamanan nasional yang efektif. Namun demikian, peran informalnya sebagai tokoh nasionalis yang memiliki kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk militer dan tokoh daerah, memperkuat posisinya sebagai integrator dalam meredakan ketegangan antara pusat dan daerah. Ia mengedepankan pendekatan kompromistis yang menyeimbangkan tindakan militer dengan diplomasi, yang mencerminkan kompleksitas peran sosial-politik yang dijalankan seorang pemimpin dalam situasi krisis.

Ralph Linton menegaskan bahwa status menentukan peran, namun efektivitas pelaksanaan peran bergantung pada kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan konteks sosialnya. Dalam hal ini, Ir. Djuanda tidak hanya menjalankan tugas sesuai protokol jabatan, tetapi juga berinisiatif untuk mengadaptasi pendekatannya terhadap dinamika politik dan sosial yang kompleks pada era 1950-an. Pendekatannya yang kompromistis menjadi penyeimbang antara kekuatan militer dan aspirasi daerah, mencerminkan kepemimpinan yang tidak kaku, tetapi responsif terhadap realitas⁷.

Melalui kerangka teori peran Ralph Linton, dapat disimpulkan bahwa Ir. Djuanda memainkan berbagai peran integral dalam penanganan konflik PRRI/Permesta. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada jabatan struktural, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral dari kepemimpinan nasional. Keberhasilan Djuanda dalam meredam krisis ini menunjukkan bahwa efektivitas pemimpin

⁷ *ibid.* hlm. 118-119

bukan hanya ditentukan oleh otoritas formal, tetapi juga oleh kemampuan menavigasi ekspektasi sosial-politik dengan pendekatan yang fleksibel dan humanis.

1.5.1.2 Teori Karisma

Max Weber membedakan tiga bentuk otoritas legitimasi dalam masyarakat yaitu tradisional, legal-rasional, dan karisma. Otoritas karismatik muncul dari keyakinan bahwa seorang pemimpin memiliki kualitas luar biasa, yang memunculkan loyalitas dan kepercayaan dari pengikutnya⁸. Karisma tidak hanya muncul dari retorika atau popularitas, melainkan juga dari persepsi terhadap keistimewaan moral, intelektual, atau spiritual yang dimiliki seorang pemimpin.

Dalam konteks Indonesia pasca-kemerdekaan, bentuk kepemimpinan karismatik kerap diasosiasikan dengan tokoh-tokoh oratoris seperti Soekarno. Namun, Djuanda mewakili tipe pemimpin yang karismanya bersumber dari integritas pribadi, kredibilitas birokratis, dan pendekatan rasional dalam menyelesaikan konflik nasional.

Tidak seperti Soekarno yang mengandalkan *oratorical charisma*, Djuanda memancarkan wibawa melalui ketenangan, kecerdasan teknokratis, dan gaya kepemimpinan yang non-konfrontatif. Kepercayaan publik dan elite politik terhadap Djuanda didasarkan bukan pada ekspresi emosional, melainkan pada reputasi moral dan kemampuannya menavigasi tantangan politik dengan diplomasi

⁸ Weber, Max, *Economy And Society An Outline of Interpretive Sociology*, University of California Press, 1978. hlm. 215

yang cermat. Ia menjadi simbol netralitas dalam dinamika politik Indonesia yang sangat terfragmentasi. Weber sendiri menyebut bahwa karisma bisa bersifat *quiet* atau senyap namun tetap berpengaruh, terutama dalam konteks birokrasi modern⁹.

Djuanda menunjukkan bahwa karisma bisa beroperasi sejalan, bukan berlawanan, dengan sistem legal-rasional. Sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, ia tetap bekerja dalam kerangka hukum dan konstitusional, tetapi pendekatannya yang tenang, konsisten, dan inklusif memberi nilai tambah yang membuatnya dihormati. Weber sendiri menyebutkan bahwa otoritas karismatik yang berhasil dilembagakan ke dalam struktur legal akan memberi stabilitas jangka panjang, yang disebut sebagai proses *routinization of charisma*¹⁰. Inilah yang dilakukan Ir. Djuanda, yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memastikan bahwa solusinya berdampak sistemik dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Weber, Ir. Djuanda mewakili tipe pemimpin yang menggabungkan karisma moral dengan rasionalitas birokrasi. Kepemimpinannya dalam penanganan konflik PRRI/Permesta memperlihatkan bahwa karisma tidak harus diwujudkan dalam bentuk ekspresif atau karismatik secara konvensional, melainkan bisa muncul dari integritas, kepakaran teknis, dan kapasitas menyatukan perbedaan.

⁹ *ibid.* hlm. 241-242

¹⁰ *ibid.* hlm. 246

1.5.1.3 Teori Deprivasi-Relatif

Teori Deprivasi-Relatif diperkenalkan oleh Ted Robert Gurr dalam karya monumentalnya *Why Men Rebel* tahun 1970, yang menyoroti akar psikologis dari tindakan kekerasan politik. Gurr berargumen bahwa ketimpangan antara apa yang diharapkan individu atau kelompok dari sistem sosial-politik dan apa yang secara nyata mereka terima merupakan pemicu utama timbulnya perilaku agresif kolektif, termasuk pemberontakan¹¹.

Konflik PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi yang pecah pada tahun 1957–1958 dapat dianalisis melalui kerangka deprivasi relatif. Kedua gerakan ini merupakan reaksi terhadap dominasi politik dan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa, yang dianggap mengabaikan kepentingan daerah-daerah luar Jawa. Sejak awal kemerdekaan, daerah-daerah kaya sumber daya seperti Sumatra dan Sulawesi memiliki ekspektasi akan otonomi yang lebih besar dan distribusi kekayaan yang adil. Banyak elite militer dan sipil di daerah berharap agar pembangunan tidak bersifat Jawa-sentris dan agar kontribusi mereka dalam perjuangan kemerdekaan diakui secara proporsional. Namun, kenyataan politik menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bergerak ke arah sentralistik. Pemerintah pusat di Jakarta mengalokasikan dana pembangunan secara tidak merata, dengan dominasi anggaran dan infrastruktur berpusat di Pulau Jawa.

¹¹ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton University Press, 1970. hlm. 13-15

Ketimpangan antara aspirasi pembangunan daerah dan kebijakan sentralisasi pemerintah menciptakan frustrasi yang menumpuk di kalangan pejabat daerah dan militer. Inilah yang dimaksud Gurr sebagai bentuk *aspirational deprivation*, ketika harapan kolektif meningkat namun tidak diimbangi oleh kondisi aktual¹². Ketika jalur politik formal dianggap tidak mampu menyalurkan aspirasi, tindakan ekstrim seperti pembentukan pemerintahan tandingan PRRI/Permesta dianggap sebagai solusi terakhir. Dalam hal ini, pemberontakan merupakan manifestasi dari ketidakpuasan struktural dan psikologis terhadap sistem pemerintahan pusat.

Teori Deprivasi-Relatif memberikan pemahaman yang kuat dalam menjelaskan mengapa konflik PRRI dan Permesta muncul sebagai respons terhadap ketimpangan struktural dan kekecewaan kolektif. Dengan demikian, pendekatan Gurr memberikan kerangka teoritis penting untuk memahami dinamika konflik pusat-daerah di masa awal kemerdekaan Indonesia.

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai dasar teoritis dan konseptual untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Kajian ini berisi telaah terhadap literatur atau sumber-sumber ilmiah yang relevan dan telah divalidasi secara akademik, sehingga dapat memperkuat argumen serta arah penelitian yang dilakukan.

Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menelusuri berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, dan konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan topik

¹² *ibid.* hlm. 37

yang diangkat. Kajian ini tidak hanya membantu dalam merumuskan landasan teori yang tepat, tetapi juga memberikan gambaran mengenai metode atau prosedur penelitian yang telah digunakan sebelumnya, yang dapat dijadikan acuan atau perbandingan.

Lebih lanjut, kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, kajian pustaka berperan penting dalam memperdalam pemahaman teoretis peneliti serta memperkuat validitas dan relevansi penelitian yang dilakukan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mengidentifikasi dan mengumpulkan sejumlah sumber relevan yang akan dijadikan sebagai bahan kajian pustaka. Sumber-sumber tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memberikan landasan ilmiah yang mendalam bagi penelitian ini. Sumber yang pertama adalah Majalah *Sketsmasa (Madjalah Lukisan Masyarakat)*, edisi Februari 1959. Majalah ini memuat berbagai laporan dan ulasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam merespons situasi politik nasional, khususnya upaya pemerintah pusat dalam menekan kekuatan pemberontakan PRRI. Sumber ini memiliki nilai historis yang signifikan karena merepresentasikan pandangan dan dinamika politik pada masa tersebut, serta dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi primer dalam menelusuri kebijakan dan strategi pemerintahan Djuanda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber kedua yang digunakan dalam kajian ini adalah buku berjudul *Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Negarawan, Administrator, dan Teknokrat* karya Awaloedin Djamin. Buku ini merupakan biografi komprehensif yang memuat perjalanan hidup Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, termasuk kiprah politiknya, kebijakan strategis yang ia ambil selama menjabat sebagai Perdana Menteri, serta wawancara dengan tokoh-tokoh terdekat yang mengenalnya secara pribadi. Buku ini sangat berharga sebagai sumber kajian karena menyajikan perspektif personal dan profesional terhadap sosok Djuanda, yang tidak hanya dikenal sebagai teknokrat andal, tetapi juga sebagai pemimpin yang berintegritas dan berdedikasi terhadap stabilitas nasional.

Sumber ketiga yang menjadi rujukan penting dalam penelitian ini adalah buku *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* karya M.C. Ricklefs. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan sejarah Indonesia dari masa pra-kolonial hingga era kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, Ricklefs menyajikan latar belakang politik dan sosial yang melatarbelakangi munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta, serta respons pemerintah pusat dalam menjaga integritas nasional. Dengan pendekatan historiografis yang objektif dan berbasis data, buku ini menjadi landasan yang kuat untuk memahami dinamika politik Indonesia, termasuk peran tokoh-tokoh penting seperti Ir. H. Djuanda dalam menghadapi tantangan nasional.

Dengan diperolehnya sejumlah sumber relevan, penulis meyakini bahwa proses penelitian ini akan berlangsung lebih sistematis dan terarah. Keberadaan

literatur literatur tersebut tidak hanya memperkaya perspektif teoritis dan historis, tetapi juga memberikan landasan empirik yang kokoh dalam menganalisis peran Ir. H. Djuanda dalam penanganan konflik PRRI dan Permesta. Dengan demikian, sumber-sumber ini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam merumuskan argumentasi yang kuat serta mendukung validitas temuan penelitian.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian mengenai tokoh pahlawan dan nasionalisme telah menjadi fokus berbagai penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian ini umumnya dijadikan acuan dalam pengembangan studi yang lebih lanjut, karena dapat menyediakan kerangka teori, metodologi, dan temuan yang relevan. Referensi dari penelitian sebelumnya, baik berupa buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artikel populer, maupun laman web terpercaya, berperan penting dalam memperkaya wawasan dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap topik yang diangkat. Selain itu, keberadaan sumber-sumber tersebut memungkinkan peneliti untuk mengkaji isu yang sama dari sudut pandang yang lebih kontemporer dan kontekstual. Dengan memanfaatkan kajian pustaka yang ada, peneliti dapat menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya bersifat replikatif, tetapi juga inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama dalam studi ini.

Penelitian yang pertama yaitu berupa jurnal yang ditulis oleh Ade Bagus Setyawan program studi Pendidikan sejarah fakultas ilmu sosial dan hukum Universitas Negeri Surabaya dengan judul jurnal Djuanda Kartawidjaja: Dari

Menteri Hingga Perdana Menteri 1946-1959. Jurnal ini memuat uraian komprehensif mengenai perjalanan karir politik Ir. H. Djuanda, mulai dari kiprahnya sebagai menteri dalam berbagai kabinet hingga posisinya sebagai Perdana Menteri. Selain menyoroti dinamika politik yang dihadapi, jurnal ini juga menggambarkan kontribusi strategis Djuanda dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat pemerintahan pascakemerdekaan. Informasi yang disajikan dalam jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kapasitas kepemimpinan Djuanda. Namun hanya sedikit uraian mengenai peran Ir. Djuanda dalam menekan konflik PRRI/Permesta.

Penelitian kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Syahrul Ramadhan Wibisono program studi sejarah peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi Peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam Meneguhkan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (1934-1963), penelitian ini mengulas secara mendalam kontribusi strategis Ir. Djuanda dalam memperkuat integrasi wilayah Indonesia, khususnya melalui kebijakan kelautan yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda tahun 1957. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah maritim Indonesia karena berhasil mengukuhkan kedaulatan negara atas seluruh perairan antar pulau sebagai bagian dari wilayah NKRI. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kebijakan tersebut tidak hanya memperluas batas teritorial laut Indonesia secara de jure, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan kesatuan wilayah negara kepulauan.

Penelitian ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Dhoni Frizky Aryasahab program studi Pendidikan sejarah Universitas Negeri Malang dengan judul jurnal Sejarah PRRI/Permesta: Awal Mula Munculnya Otonomi Daerah Secara Menyeluruh Di Indonesia mengkaji dinamika sejarah bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi pada masa pasca-kemerdekaan. Jurnal ini menyoroti bagaimana gerakan PRRI dan Permesta, yang semula muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap ketimpangan pembangunan dan sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat, menjadi pemicu munculnya diskursus mengenai perlunya otonomi daerah. Penulis jurnal ini menekankan bahwa walaupun PRRI/Permesta dikategorikan sebagai pemberontakan, fenomena ini juga mencerminkan tuntutan akan distribusi kekuasaan yang lebih adil dan representatif. Oleh karena itu, konflik ini tidak hanya merupakan peristiwa militer-politik, tetapi juga menjadi batu loncatan menuju perumusan kebijakan otonomi daerah secara lebih komprehensif di masa-masa berikutnya. Kajian ini penting dalam merekonstruksi sejarah otonomi daerah di Indonesia serta memahami akar sosial-politik dari relasi antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan. Namun minim sekali uraian mengenai peranan Ir. Djuanda pada jurnal ini.

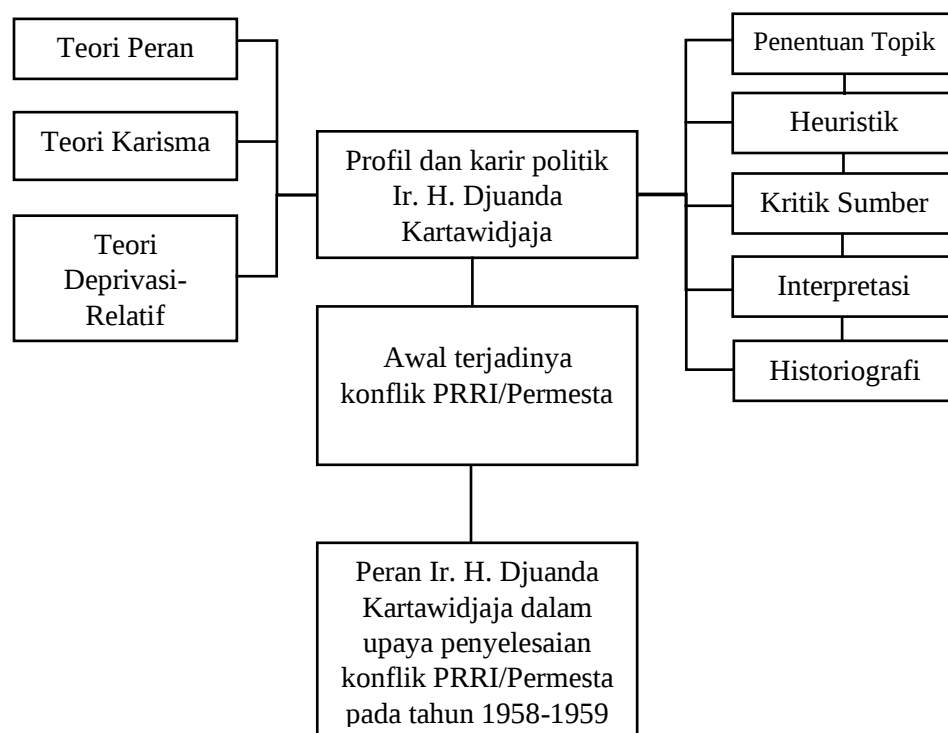
Penelitian keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Joko Suryanto program studi Pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma dengan judul skripsi Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961 berisi mengenai latar belakang, dinamika, dan dampak dari pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik

Indonesia (PRRI). Fokus utama penelitian ini adalah pada konteks lokal di Sumatera Barat, daerah yang menjadi pusat deklarasi dan aktivitas PRRI. Penulis mengkaji berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya gerakan ini, seperti ketimpangan distribusi ekonomi, kekecewaan terhadap kebijakan sentralistik pemerintah pusat, serta peran militer daerah. Skripsi ini juga menggambarkan kronologi peristiwa militer dan politik yang terjadi selama masa pemberontakan, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk meredam gerakan tersebut. Melalui pendekatan historis dan deskriptif, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas relasi antara pusat dan daerah dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan. Penelitian ini hanya berfokus pada Gerakan PRRI di Sumatera Barat saja dan minim penjelasan mengenai peran Ir. Djuanda.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan dasar pemikiran yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu penelitian. Konsep yang disusun dalam kerangka ini membantu penulis dalam membatasi ruang lingkup kajian, sehingga fokus penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Dengan adanya kerangka konseptual, penulis dapat merumuskan pendekatan yang tepat dalam menjawab rumusan masalah, serta mengintegrasikan teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka dan digunakan untuk memahami serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peran Ir.

H. Djuanda Kartawidjaja dalam penanganan konflik PRRI/Permesta. Batasan temporal dalam penelitian ini ditetapkan hingga tahun 1959, yaitu masa di mana Ir. H. Djuanda Kartawidjaja mengakhiri jabatannya sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Penetapan batas waktu ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar fokus pada periode ketika Ir. Djuanda secara langsung terlibat dalam penanganan konflik PRRI/Permesta.



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, penelitian ini mengkaji secara menyeluruh sosok Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, dimulai dari profil hidup dan karir politiknya hingga pada peran penting yang ia mainkan dalam menghadapi konflik PRRI/Permesta. Penelitian ini disusun secara kronologis dan sistematis untuk memberikan pemahaman utuh mengenai kontribusi Djuanda terhadap integrasi nasional pada masa pasca-kemerdekaan.

Pembahasan dimulai dengan penelusuran latar belakang kehidupan dan karir politik Ir. H. Djuanda sebagai teknokrat dan negarawan yang menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, penelitian ini mengulas secara mendalam mengenai awal mula terjadinya konflik PRRI/Permesta yang berpingkal pada ketimpangan pusat-daerah, serta respons pemerintah pusat terhadap ancaman disintegrasi tersebut.

Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap peran Ir. H. Djuanda dalam upaya penyelesaian konflik PRRI/Permesta. Dalam konteks ini, pendekatan diplomatik dan militer yang digunakan oleh Djuanda menjadi sorotan utama untuk memahami strategi kepemimpinannya dalam menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori-teori sosial-politik, seperti teori peran Ralph Linton, teori karisma Max Weber dan teori deprivasi relatif Ted Robert Gurr, guna memberikan kerangka konseptual dalam menganalisis dinamika konflik dan peran kepemimpinan dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian historis yang mencakup empat tahapan utama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan

historiografi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap studi sejarah tokoh nasional dan dinamika konflik politik di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian Sejarah

Penelitian ini merupakan suatu usaha ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta sumber-sumber sejarah guna menyusun sebuah narasi atau gambaran peristiwa secara kronologis dan faktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yang lazim diterapkan dalam studi sejarah. Metode historis bertumpu pada prinsip kerja ilmiah yang sistematis, yang mencakup proses pengumpulan, penelaahan, dan penafsiran sumber-sumber sejarah yang relevan. Metode historis ini terdiri dari lima tahapan utama yaitu Penentuan topik, Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi¹³. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan peristiwa masa lampau secara mendalam, serta memahami kaitan antara peristiwa tersebut dengan dinamika sosial-politik masa kini¹⁴. Esensi utama dari pendekatan ini adalah memahami bukan sekadar menjelaskan, juga menangkap makna, pengalaman, dan sudut pandang subjek penelitian secara kontekstual¹⁵. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan dampak dari tindakan-tindakan tokoh

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1992. hlm. 89-105

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remajarosda Karya, 2006. hlm. 89

¹⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018. hlm. 91

sejarah, khususnya Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, dalam konteks penyelesaian konflik PRRI/Permesta.

1.6.1 Penentuan Topik

Langkah awal dalam proses penelitian sejarah dimulai dengan pemilihan topik yang menjadi fondasi utama dari keseluruhan kegiatan ilmiah. Dalam memilih topik, peneliti dituntut untuk memiliki dua bentuk kedekatan, yakni kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional merujuk pada sejauh mana peneliti memiliki minat, ketertarikan, atau bahkan keterlibatan personal terhadap isu yang akan dikaji, sehingga dapat mendorong semangat dan konsistensi selama proses penelitian berlangsung. Sementara itu, kedekatan intelektual menunjukkan pentingnya penguasaan substansi dan pemahaman teoritis terhadap topik yang dipilih. Artinya, peneliti perlu memiliki landasan pengetahuan yang cukup serta kerangka pikir yang sistematis agar mampu menganalisis dan menafsirkan data sejarah secara kritis dan objektif. Kedua unsur tersebut menjadi prasyarat penting agar proses penelitian tidak hanya berjalan dengan efektif, tetapi juga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bermakna.

1.6.2 Heuristik

Tahapan Heuristik ini merupakan tahapan dalam metode penelitian historis yang berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa:

1. Sumber primer, seperti arsip, dokumen resmi, surat kabar, dan majalah sezaman (misalnya *Sketsmasa* edisi Februari 1959)

2. Sumber sekunder, seperti buku biografi (Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda oleh Awaloedin Djamin), buku sejarah (Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 oleh M.C. Ricklefs), jurnal, artikel, serta karya ilmiah terdahulu seperti skripsi dan tesis.

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri berbagai sumber tersebut guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai latar belakang, konteks politik, serta peran Ir. H. Djuanda dalam menangani konflik PRRI dan Permesta hingga tahun 1959.

1.6.3 Kritik Sumber

Tahapan ini bertujuan untuk menilai keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) sumber yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik. Kritik sumber dibagi menjadi dua jenis yaitu, Kritik ekstern, yakni mengevaluasi keaslian dokumen, kapan ditulis, siapa penulisnya, dan kondisi fisiknya. Dan kritik intern, yaitu menilai isi dari sumber, apakah data di dalamnya akurat, netral, dan relevan terhadap fokus penelitian.

1.6.4 Interpretasi

Interpretasi adalah proses menganalisis dan menafsirkan data sejarah yang telah dikritisi. Peneliti menghubungkan berbagai fakta sejarah yang ditemukan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat, latar belakang, serta makna dari peristiwa yang diteliti.

1.6.5 Historiografi

Tahapan terakhir dalam metode historis adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan logis. Pada tahap ini, penulis menyusun hasil interpretasi menjadi sebuah kisah ilmiah yang bertujuan menjelaskan secara runtut dan komprehensif peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam menangani konflik PRRI/Permesta.

Historiografi tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga mengemukakan analisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Penulisan dilakukan dengan memperhatikan unsur kronologi, konsistensi argumentasi, dan penggunaan bahasa ilmiah yang sesuai.

Hasil historiografi ini diharapkan tidak hanya menambah pemahaman terhadap sosok Djuanda, tetapi juga memperkaya diskursus sejarah mengenai integrasi nasional dan penanganan konflik daerah di masa awal Republik Indonesia.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar setiap bagian saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Tiap bagian akan membahas aspek-aspek penting yang relevan dengan pokok permasalahan, serta menguraikan hasil analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan teori yang digunakan.

Bagian awal dalam penelitian ini mencakup elemen-elemen penting yang bersifat pendahuluan dan administratif. Seperti sampul, halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi dan daftar tabel.

Bab I pendahuluan merupakan bagian awal dari isi pokok penelitian yang memuat penjelasan mengenai topik yang diangkat oleh penulis. Latar belakang berisi tentang alasan mendasar pemilihan topik penelitian, urgensi permasalahan yang dikaji, serta konteks historis maupun akademik yang melatarbelakangi penelitian. Rumusan masalah berusaha untuk merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas dan spesifik sebagai acuan dalam menjawab fokus permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. Manfaat dan kegunaan penelitian berisi mengenai uraian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah, maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Kajian teori membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas serta bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis data penelitian. Kajian pustaka membahas mengenai sumber-sumber bacaan yang memiliki relevansi dengan topik bahasan peneliti dan dijadikan referensi penelitian. Penelitian yang relevan membahas tentang temuan penulis mengenai penelitian terdahulu yang juga memiliki relevansi dengan topik bahasan peneliti. Kerangka konseptual bertujuan agar pembahasan penelitian lebih terarah dan sistematis. Metode penulisan historis berisi mengenai penjelasan terhadap metode yang digunakan melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Pada bab II ini peneliti menguraikan profil dan karir politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaja secara kronologis dan sistematis guna menjelaskan latar belakang tokoh hingga bisa berperan dalam usaha pencegahan disintegrasi bangsa.

Pada bab III membahas mengenai latar belakang yang melatarbelakangi munculnya konflik PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta). Pembahasan difokuskan pada kondisi politik, ekonomi, serta ketimpangan hubungan pusat-daerah pada masa pasca-kemerdekaan yang menjadi faktor pemicu ketegangan. Pemahaman terhadap konteks ini penting sebagai landasan untuk mengkaji peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Pada bab IV membahas secara mendalam mengenai peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam upaya penyelesaian konflik PRRI/Permesta yang terjadi pada tahun 1958 hingga 1959. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Pertahanan, Djuanda memainkan peranan kunci dalam merumuskan dan menjalankan strategi nasional guna meredam potensi disintegrasi bangsa yang ditimbulkan oleh gerakan separatis tersebut.

Bab V berisi tentang kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan berisi ringkasan dari temuan-temuan utama dalam penelitian yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti merangkum secara sistematis inti dari analisis yang telah dilakukan terkait peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dalam menyelesaikan konflik PRRI/Permesta. Serta diakhiri dengan saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, pembaca, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kajian sejarah dan kepemimpinan.

Daftar Pustaka memuat seluruh sumber referensi yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dan mendukung pembahasan topik. Semua referensi disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, guna memastikan validitas dan akuntabilitas ilmiah dari penelitian ini.